



**PREFERENSI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA HUTA BARU
KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**IHWAN SORMIN
NIM. 1610300026**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN AJARAN
2021**



**PREFERENSI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA HUTA BARU
KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**IHWAN SORMIN
NIM. 1610300026**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN AJARAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Skripsi
A. n. **Ihwan Sormin**

Padangsidimpuan, Januari 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a. n. **IHWAN SORMIN** yang berjudul "**PREFERENSI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA HUTA BARU KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihwan Sormin

NIM : 1610300026

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru
Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2020

Ihwan Sormin
NIM. 1610300026

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihwan Sormin
NIM : 1610300026
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Januari 2021
Yang menyatakan,

Ihwan Sormin
NIM. 1610300026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ihwan Sormin
NIM : 16 103 00026
**Judul Skripsi : Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru
Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Ketua

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimuthe, S.H, M.H
NIP 19711528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimuthe, S.H, M.H
NIP 19711528 200003 2 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP 19900315 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 10 November 2020
Pukul : 09.00 WIB s/d 10.30 WIB
Hasil/Nilai : B/78,51
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,49
Predikat : **Sangat Memuaskan**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : /In.14/D/PP.00.9/01/2021

Judul Skripsi : **Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru
Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan**

Ditulis Oleh : **Ihwan Sormin**

NIM : **16 103000 26**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S. H).

Padangsidempuan, Januari 2021

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama :Ihwan Sormin
Nim :16 103 000 26
Judul :Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi preferensi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini adalah apakah preferensi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa Kuisisioner yaitu berupa daftar pertanyaan dimana responden tinggal memilih jawaban yang sudah peneliti sediakan. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 100 orang dari masyarakat Desa Huta Baru.

Untuk menguji kebenaran penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data Deskriptif-Kualitatif. Deskriptif-Kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dihubungkan dengan teori yang menunjang pembahasan, sehingga bisa menjelaskan sebab akibat yang mempengaruhi partisipasi politik di desa. Analisis deskriptif ini diawali dengan pengumpulan data, penyajian data, analisis data dan akhirnya penarikan kesimpulan. Indikator dalam penelitian ini adalah adanya Perangsang, karakteristik Seseorang, kepedulian sosial dan status sosial yang tinggi.

Hasil penelitian membuktikan bahwa indikator Perangsang lebih dominan menjadi preferensi politik dalam pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kata Kunci : Preferensi, Politik, Pemilihan Kepala Desa.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.”** Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S. H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. oleh karenaitu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan,
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.,selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag., selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Hasiah, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Bapak Kepala Desa Aek Nabara beserta jajarannya, kepada Bapak para tokoh adat, tokoh agama yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Tiaya Pane dan Ayahanda tersayang Hibban Sormin yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
10. Saudara-saudara saya, ke dua adek saya: Kurnia Sormin, dan Salsabila Sormin yang baik hati dan selalu mematuhi kedua orangtua, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berempat selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terima kasih kepada Kawan seperjuangan, Muhammad Kadirun, Ali Rahmat Situmorang, Muhammad Sahron, Hendrik JP Siregar, Dean Antono, Bayu Pamungkas, Isa Yurida Tanjung,S.H, Miska Barlen, Tuti Ammasari Siregar, Sri Hamdani Siregar dan Rizky Handayani yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2016, Lila Angei Hasibuan, Sallim Syahputa, Zulfa Rahmy Harahap, Ahmad Hidayat Nasution, Anju Imam Dermawan, Ahmad Rosyidin Hasibuan, Khairul Anwar Nasution, Marcelliani, Ayu Elistiar Purba. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

13. Kepada Kakanda dan Ayunda dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Kanda Rahmat Kurniawan Siregar dan Kanda Borkat Halomoan Siregar dan kawan kawan perjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam. Terima kasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.
14. Kepada guru-guru ku sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang formal maupun non formal.
15. Kepada Anggi Marito Ritonga orang spesial yang selalu bersedia membantu dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai.
16. Kepada Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Januari 2021

Peneliti,

Ihwan Sormin
1610300026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	Dommah	U	U

- b. VokalRangkapadalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....ؤ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ی...،...	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
و...،...	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan ke dua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Ke lima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI.....	iii
PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN DEKAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Batasan Istilah	10
G. Kajian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Preferensi Politik.....	16
B. Teori Partisipasi Politik	19
C. Teori Kebijakan Publik.....	21
D. Teori Perilaku Pemilih.....	23
E. Sistem Pemilihan Kepala Desa	27
BAB III. METODE PENELITIAN	33
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian.....	33

C. Informan Penelitian	34
D. Pendekatan Penellitian	34
E. Sumber Data	35
F. Metode Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN	40
A. Temuan Umum	40
1. Sejarah Singkat Desa Huta Baru	40
2. Demografi	40
3. Potensi Sumber Daya Manusia	42
4. Mata Pencaharian	43
5. Keadaan Ekonomi	44
6. Kondisi Agama.....	45
B. Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.	54
BAB V. PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan demokrasi yang ada di negara Indonesia telah mengalami pasang surut. Ditandai dengan adanya era reformasi yang telah membawa perubahan terhadap aspek-aspek kehidupan di Indonesia, baik dari segi sistem politik, ekonomi, hukum, budaya dan lainya yang telah mengalami pergeseran struktur sejak reformasi bergulir. Perubahan sistem yang multi dimensional seperti ini telah menjadikan perubahan peta kekuatan politik baik ditingkat pusat maupun daerah yang menuntut adanya pembaharuan dalam sistem politik agar lebih terbuka dan demokratis, dengan harapan terciptanya suatu kestabilan politik yang dinamis.

Demokrasi di negara di Indonesia telah ada semenjak berdirinya Republik Indonesia dengan masalah pokok sangat beraneka ragam seperti budaya, tingkat kehidupan ekonomi dan juga membina kehidupan sosial dan politik, dalam kehidupan politik hal tersebut ditandai dengan dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, begitupula demokrasi di desa sudah berlangsung sejak lama, apalagi dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah serta di amandemennya UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah daerah. Kata “ demokrasi “ berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos / cratain* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas pemerintahan maka dibentuk daerah-daerah yang dikepalai oleh pemimpin, termasuk juga desa. Pembagian daerah-daerah di Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak asal usul yang bersipat istimewa seperti marga dan dusun. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghormati daerah-daerah yang bersipat istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang tentang daerah-daerah itu dan asal usul daerah tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan program pembangunan desa yang lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di desa yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan desa, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih kurang. Preferensi Politik adalah aktivitas warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik melalui selera dan kecendrungan masyarakat. Preferensi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat preferensi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Preferensi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan.

Kabupaten Tapanuli Selatan terbentuk dari Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092).¹

¹ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah

Menurut Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa kepala desa adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.²

Pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari adanya preferensi politik masyarakat desa. Preferensi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langka-langkanya) ke dalam simbol-simbol pribadi. Atau dengan perkataan lain, Pelaksanaan preferensi dari warga negara/masyarakat dalam salah satu contoh keputusan yang dibuat oleh pemerintah yaitu pemilihan umum di tingkat pusat dan di tingkat desa disebut pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya preferensi politik dari masyarakat.

Preferensi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari pada bakal calon Kepala Desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanakan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon Kepala Desa biasanya

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092).

² Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa

dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan berlangsung dengan cara sangat menagangkan, panas, penuh dengan tehnik, terror dan syarat dengan modal (politik uang). Umumnya, para calon Kepala Desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solit dan kompak serta siapa yang memiliki modal uang yang paling banyak memiliki potensi yang besar untuk memenangkan pemilihan Kepala Desa. Para bakal calon biasanya berasal dari orang kuat secara politik dan ekonomi di desanya.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan adanya calon Kepala Desa yang mendatangi rumah masyarakat yang bertujuan memberikan sesuatu berupa uang agar dalam pemilihan Kepala Desa nantinya dapat memperoleh suara terbanyak. Selain aktivitas-aktivitas dalam pemilihan Kepala Desa masyarakat Desa Huta Baru menjadi partisipan dalam pemilihan Kepala Desa dengan cara ikut menjadi juru kampanye (jurkam) dalam memsosialisasikan program-program akan dicapai oleh salah satu calon Kepala Desa, ikut menjadi anggota aktif dalam aktivitas dari masyarakat yaitu menjadi tim sukses atau program-program sosial desa seperti mempromosikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon Kepala Desa tersebut.

Masyarakat Desa Huta Baru yang ikut dalam aktivitas

pemilihan Kepala Desa (Pilkades), menjadi partisipan dalam Pilkades ada juga yang menjadi pengamat mengenai jalannya Pilkades baik dalam tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan, seperti menghadiri rapat-rapat umum atau diskusi-diskusi siapa saja yang akan menjadi calon Kepala Desa mengamati siapa-siapa saja yang akan menjadi tim sukses dari masing-masing calon Kepala Desa (Pilkades), mengikuti perkembangan politik dari masing-masing Calon Kepala Desa. Pengamat tersebut akan memberikan suaranya dalam Pilkades setelah melihat dari masing-masing calon Kepala Desa.

Umumnya dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Huta Baru seharusnya masyarakat memiliki antusias yang begitu tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan Kepala Desa, karena sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi dari pihak manapun dan sebagian masyarakat adanya keterpaksaan dari salah satu kandidat calon Kepala Desa (Kades). Apalagi kepada para pendatang yang cukup banyak berdomisili di wilayah Desa Huta Baru, adanya tekanan-tekanan para pendukung salah satu Calon Kepala Desa (Tim Sukses) terhadap masyarakat pendatang karena telah didata terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemilihan, adanya unsur paksaan ini karena salah satu calon kepala desa sangat berambisi sekali untuk

memenangkan kembali menjadi kepala desa, karena itu adanya paksaan untuk para pendang karena masyarakat lokal secara terang-terangan menyatakan ketidak sukaan terhadap calon kepala desa ini karena tidak adanya perubahan desa selama menjabat menjadi kepala desa, padahal desa Huta Baru merupakan desa berpenghasilan salak terbanyak di Kecamatan Batang Toru. Selain itu ada juga sebagian masyarakat memilih calon Kepala Desa tersebut karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon Kepala Desa.

Adanya masyarakat yang menjadi orang apathis terhadap pelaksanaan Pilkades, orang itu benar-benar tidak peduli tentang pemilihan Kepala Desa baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan bahkan tidak memilih sala satu dari calon Kepala Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Huta Baru.

Pada pemilihan Kepala Desa Huta Baru Periode Tahun 2019 dilaksanakan pada hari kamis tanggal 03 Desember 2016 tercatat jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih adalah sebanyak 472 pemilih sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jumlah Penduduk Yang Mempunyai Hak Pilih

NO	Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih	Jumlah Suara	Persentase	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Yang Menggunakan Hak	410 Suara	88%	406	4 (2%)

	Pilih			(98%)	
2	Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	62 Suara	12%		
Jumlah		472 Orang	100%	410 Suara	

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Huta Baru jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih sebanyak 773 (100%) pemilih, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 677 (88%) pemilih dan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa di desa Huta Baru sebanyak 62 (12%) pemilih.

Adanya suara tidak sah dalam pemilihan Kepala Desa itu sudah biasa begitu juga yang terjadi di Desa Huta Baru dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adanya suara yang sah dan suara yang tidak sah, masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa sebanyak 410 (100%) orang, suara yang sah dalam pemilihan Kepala Desa di desa Huta Baru sebanyak 406 (98%) suara namun adanya suara yang tidak sah sebanyak 4 (2%) suara.

Dari tabel di atas, dapat kita lihat banyaknya suara yang tidak sah dan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih penulis menyimpulkan suara yang terbuang dengan percuma sebanyak 66 suara, ini terjadi karena surat suara yang diberikan masyarakat lebih dari satu coblosan kemudian panitia pemilihan

³ Panitia Pemilihan Kepala Desa 2016

menganggap suara ini tidak sah atas persetujuan dari masing-masing calon Kepala Desa, ini terjadi karena kesalahan pelipatan surat suara dan kurangnya sosialisasi panitian kepada masyarakat untuk memberikan informasi mengenai tata cara pencoblosan dan cara membuka lipatan surat suara, selain itu jarak tempat pemilihan yang cukup jauh dari perumahan masyarakat sehingga masyarakat tidak hadir untuk memberikan suaranya.

Dalam pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Huta Baru merupakan harapan baru bagi masyarakat kerana masyarakat memiliki harapan yang tinggi kepada calon Kepala Desa yang mereka pilih untuk mensejahterakan masyarakat menciptakan rasa aman, nyaman, tentram, adanya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, meningkatkan pembangunan pada desa dan lain sebagainya Data Calon Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan :

1. Nama : Muhlis Pohan
Tempat/ Tanggal Lahir : Huta Baru, 23 April 1984
Pendidikan : SLTA
2. Nama : Hasran Nawali Harahap
Tempat/ Tanggal Lahir : Hutabaru, 18 Agustus 1980
Pendidikan : SLTA

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Sellatan

Nomor: 07/BPD- MSL/2016, Tanggal 13 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁴

NO	NAMA CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA	DESA/ KECAMATAN
1	MUHLIS POHAN	219	HUTA BARU/ BATANG TORU
2	HASRAN NAWALI HARAHAHAP	191	
JUMLAH		410	

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa yang terpilih untuk menjadi kepala desa periode 2016-2022 adalah Bapak Muhlis Pohan, masyarakat berharap dengan terpilihnya pemimpin baru tentu merupakan harapan baru bagi masyarakat supaya nantinya benar-benar mengabdikan dirinya demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Desa Huta Baru.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang terjadi yaitu masyarakat apatis dan kurang mengetahui mengapa memilih salah satu calon Kepala Desa, seperti yang disampaikan Bapak Basirun Siregar bahwa responden tidak mempelajari mengapa responden memilih salah satu calon, responden tidak melihat dari pendidikannya, kedermawanany ataupun kesalehannya, artinya responden tidak mengetahui preferensinya dalam memilih Kepala Desa.⁵ Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang

⁴ *Panitia Pemilihan Kepala Desa 2016*, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 07/BPD-MSL/2016

⁵ Wawancara dengan Basirun Siregar 9 November 2020

terjadi di dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan judul: **Preferensi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Preferensi Politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Huta Baru?

C. Batasan Istilah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada Preferensi Politik dan Pemilihan Kepala Desa Huta Baru

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Preferensi Politik masyarakat pada pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 2.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam proposal ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Preferensi Politik adalah aktivitas warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik mealui selera dan kecendrungan masyarakat.
2. Sesuai Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Menurut Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang pemilihan Kepala Desa adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Preferensi politik ialah keterlibatan induvidu atau kelompok pada level terendah sampai tertinggi dalam sisitem politik.

Hal ini berarti bahwa preferensi politik merupakan bentuk konkret kegiatan politik yang dapat mengabsahkan seseorang berperan serta dalam system politik. Dengan demikian maka setiap individu atau kelompok yang satu dengan yang lain akan memiliki perbedaan-perbedaan dalam preferensi politik karena preferensi menyangkut peran kongkret dimana seseorang akan berbeda perananya, strukturnya dan kehendak dari system politik yang di ikuti.

B. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Achlak Asmara Yasa, judul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Kabupaten Gowa” dengan kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat sanagt tinggi dan untuk pemilih pemula kurang berpartisipasi.

Perbedaan skripsi yang penulis teliti yaitu, peneliti meneliti pada preferensi masyarakat sedangkan skripsi Achlak focus pada partisipasi..

2. Skripsi Mohammad Amanu, judul “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa(Studi Kasus di Desa Jatirejo

Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)” dengan kesimpulan bahwa dalam melakukan tindakan praktik politik uang maupun preferensi dalam kontestasi pemilihan kepala desa, setiap agen memiliki motivasi yang berbeda-beda. Diantaranya yaitu motivasi atas penghargaan, motivasi atas aktualisasi diri dan motivasi atas kebutuhan sosial. Secara teoritis motivasi atas penghargaan dan aktualisasi diri termasuk dalam bentuk kesadaran diskursif, sedangkan motivasi atas kebutuhan sosial merupakan bentuk kesadaran praktis agen. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan agen dalam kontestasi pemilihan kepala desa mencerminkan motif yang mengarah pada kepentingan-kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok sebagai rasionalitas atas tindakan yang dilakukan.⁶

Sementara dalam penelitian ini peneliti akan membahas pengaruh politik uang itu sendiri terhadap kebijakan yang dikeluarkan kepala desa.

3. Skripsi Andi Akbar, judul “ Pengaruh Politik Uang Terhadap Preferensi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kecamatan Bulukumba)” dengan kesimpulan bahwa Pengaruh Politik

⁶Mohammad Amanu “*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)*”, skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2015.

uang terhadap preferensi masyarakat Barugae pada pilkada 2015 memang memberikan pengaruh yang cukup signifikan dimana mayoritas masyarakat Barugae yang menerima Politik uang turut berppreferensi dalam pilkada walaupun dalam pemberian uang maupun barang kepada pemilih tidak menjamin dalam menentukan pilihan masyarakat dalam memberikan suarakepada pemberi, hal tersebut karena hal ini di pengaruhi beberapa faktor seperti pemilih ganda yang mendapat uang lebihdari satu kandidat, kualitas tim sukses juga mempengaruhi masyarakat dalam memilih kandidat yang di sarankan karena kandidat yang baik adalah kandidat yang memiliki banyak akses jaring dengan pemilih baik berupa hubungan keluarga, teman maupun teman bisnis dan terakhir adalah kualitas strategi dari calon kandidat yang dapat mengikat pilihan masyarakat untuk memilih calon kandidat yang memberikan sesuatu yang lebih berguna bagi masyarakat seperti perbaikan jalan yang lebih di angap penting oleh masyarakat dibandingkan uang yang berefek sementara saja.⁷

Sementara dalam penelitian ini peneliti akan membahas pengaruh politik uang itu sendiri terhadap kebijakan yang dikeluarkan kepala desa.

⁷Andi Akbar “Pengaruh Pollitik Uang Terhadap Preferensi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kecamatan Bulukumba)”, skripsi UIN Alauddin Makassar , 2016.

4. Skripsi Mohammad Amanu, judul “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa(Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)” dengan kesimpulan bahwa dalam melakukan tindakan praktik politik uang maupun preferensi dalam kontestasi pemilihan kepala desa, setiap agen memiliki motivasi yang berbeda-beda. Diantaranya yaitu motivasi atas penghargaan, motivasi atas aktualisasi diri dan motivasi atas kebutuhan sosial. Secara teoritis motivasi atas penghargaan dan aktualisasi diri termasuk dalam bentuk kesadaran diskursif, sedangkan motivasi atas kebutuhan sosial merupakan bentuk kesadaran praktis agen. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan agen dalam kontestasi pemilihan kepala desa mencerminkan motif yang mengarah pada kepentingan-kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok sebagai rasionalitas atas tindakan yang dilakukan.⁸

Sementara dalam penelitian ini peneliti akan membahas pengaruh politik uang itu sendiri terhadap kebijakan yang dikeluarkan kepala desa.

5. Skripsi Achlak Asmara Yasa, judul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Kabupaten Gowa” dengan

⁸Mohammad Amanu “*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa(Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)*”, skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2015.

kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat sangat tinggi dan untuk pemilih pemula kurang berpartisipasi.

Perbedaan skripsi yang penulis teliti yaitu, peneliti meneliti pada preferensi masyarakat sedangkan skripsi Achlak focus pada partisipasi.

C. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II Kajian Teori, yang membahas tentang Preferensi politik masyarakat pada pemilihan Kepala desa Huta Baru.

BAB III Metode penelitiannya itu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, sistematika penulisan.

BAB IV Hasil Penelitian meliputi Preferensi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru.

BAB V Penutup, penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang dapat mendukung kesempurnaan skripsi, serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Partisipasi Politik.

Partisipasi politik ialah keterlibatan individu atau kelompok pada level terendah sampai tertinggi dalam sistem politik. Hal ini berarti bahwa Partisipasi politik merupakan bentuk konkret kegiatan politik yang dapat mengabsahkan seseorang berperan serta dalam sistem politik. Dengan demikian maka setiap individu atau kelompok yang satu dengan yang lain akan memiliki perbedaan-perbedaan dalam Partisipasi politik karena Partisipasi menyangkut peran konkret dimana seseorang akan

berbeda peranannya, strukturnya dan kehendak dari system politik yang di ikuti.⁹

Selanjutnya dijelaskan bahwa Partisipasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu pasif dan aktif . Partisipasi aktif adalah mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Mengajukan kritik dan saran untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, memilih calon pemimpin sebaliknya, Partisipasi pasif adalah menaatai pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Pertanyaan yang kemudian muncul mengapa seorang berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam proses politik?

Faktor faktor yang mungkin mempengaruhi tinggi rendahnya Partisipasi masyarakat terhadap pemilu ialah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah kesadaran terhadap pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Yang dimaksud sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah ialah

⁹ Rahmawati Halim,, *Partisipasi Politik Masyarakat*, (Jakarta : Sahmedia, 2012), hlm. 56

penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah ia menilai pemerintah dapat di percaya dan dipengaruhi atau sebaliknya.

Berdasarkan tinggi rendahnya Partisipasi tersebut, Peige membagi Partisipasi menjadi empat tipe. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah tinggi, maka Partisipasi politik cenderung aktif, sebaliknya pula apa bila kesadaran poltik dan kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah maka Partisipasi politik cenderung pasif (tertekan). Partisipasi ketiga berupa militant radikal, yakni apabila kesadaran politik masyarakat tinggi tetapi kepercayaan terhadap rendah maka Partisipasi ini disebut pasif, selanjutnya apabila kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah tinggi maka Partisipasi ini disebut tidak aktif.¹⁰

B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik.

Jika mode Partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” Partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk Partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk Partisipasi politik menjadi :

1. Kegiatan Pemilihan.

Kegiatan Pemilihan yaitu Kegiatan pemberian suara

¹⁰Sukidin, Dkk, *Sosiologi Politik*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 72-73

dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.

2. Lobby.

Lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.

3. Kegiatan Organisasi

Kegiatan Organisasi yaitu Partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

C. Teori Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan kedalam dua kubu yaitu *Mazhab Colombia* dan *Mazhab Michigan*.

Pemilih diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan mereka agar mendukung dan memilih kontestan politik yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini

merupakan konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa perilaku pemilih yang demikian rupanya hampir sama dengan perilaku dukungan supporter. Inilah yang menjadi permasalahan ketika banyaknya pemilih yang cenderung perilaku politiknya termanifestasi pada satu poin tertentu, bisa itu karena adanya suatu keterkaitan si pemilih dengan si calon atau kandidat.

Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di pemilu. Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas. Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu preferensi pilihan terhadap suatu partai politik merupakan suatu produk dari karakteristik sosial individu yang bersangkutan.¹¹

Pemilih diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mempengaruhi

¹¹ Jamaludi Ghafur, Dkk, *Presidential Threshold*, (Malang : Setara Press, 2019), hlm. 72-73

mereka dan meyakinkan mereka agar mendukung dan memilih kontestan politik yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini merupakan konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa perilaku pemilih yang demikian rupanya hampir sama dengan perilaku dukungan suporter. Inilah yang menjadi permasalahan ketika banyaknya pemilih yang cenderung perilaku politiknya termanifestasi pada satu poin tertentu, bisa itu karena adanya suatu keterkaitan si pemilih dengan si calon atau kandidat.

Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu:¹²

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh-pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial seperti pekerjaan, pendidikan sampai karakteristik sosiologis seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya merupakan bagian-bagian dan faktor-faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Singkat kata pengelompokan sosial seperti umur, jenis kelamin,

¹² M. Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. (Surabaya: Pustaka Utama. 2004).Hlm.137.

agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan seseorang.

Pendekatan sosiologis melihat bahwa dalam kelompok-kelompok sosial, terdapat kognisi sosial tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku dan pilihan tertentu. Dalam kelompok-kelompok sosial, berlangsung proses sosialisasi. Lingkungan sosial memberikan bentuk-bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma dalam masyarakat, serta memberikan pengalaman hidup.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini menggunakan konsep psikologis terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku pemilih kalau ada proses sosialisasinya. Oleh karena itu menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku politik seseorang. Oleh karena itu pilihan seseorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik tidak jarang sama dengan pilihan politik orang tuanya. Pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai

politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi kepada kandidat.

3. Pendekatan Rasional

Dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih kandidat yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Hal ini juga sejalandengan prinsip ekonomi dan hitung ekonomi. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon Kepala desa akan melakukan berbagai promosi dan kampanye yang bertujuan untuk menarik simpati dan keinginan masyarakat untuk memilih dirinya pada pilkades.

Perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk memahami faktor pemilih dalam menentukan pilihannya pertama kita harus memahami bagaimana konteks latar belakang historisnya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. Ini dikarenakan budaya politik di Indonesia masih kental akan sejarah dan kebudayaan masa lampau.

Faktor lainnya ialah kondisi geografis dan wilayah. Hal ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu, secara tidak langsung perilaku pemilih banyak ditentukan oleh faktor wilayah. Oleh karena itu kondisi dan faktor geografis/wilayah menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, peraturan dan kebijakan sampai dalam pemilihan umum. Hal ini menuntut agar si calon pandai-pandai membuat strateginya dalam kampanye agar perilaku pemilih cenderung memilih si kandidat tersebut.¹³

D. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁴

¹⁴Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

E. Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era pilkada langsung, akhir-akhir ini ada kecenderungan pilkades dilakukan

secara serentak oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan lebih efisien, efektif, dan terkoordinasi dari sisi keamana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yaitu :¹⁵

1. BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, pemilihan Kepala Desa bersipat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
3. Kepala Desa maksimal menjabat dua kali atau selama dua periode.
4. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan penghitungan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

¹⁵ Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

5. Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.
6. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi budaya setempat.
7. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye.
8. Calon Kepala Desa yang terpilih adalah calon yang memiliki suara terbanyak
9. Panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD
10. Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada bupati melalui camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa
11. Kepala Desa terpilih dilantik oleh bupati paling lama 15 hari terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati
12. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan yang keanggotaannya berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur

toko masyarakat, melalui musyawara dan mufakat kemudian ditetapkan dengan keputus BPD.

Susunan kepanitian pemilihan Kepala Desa Munsalo terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Tujuh Anggota

Dalam pemilihan Kepala Desa masyarakat yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa apabila telah melengkapi persyaratan berikut:

1. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan tidak bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus pada saat pendaftaran.
2. Pada saat pendaftaran dilaksanakan sudah mencapai usia 17 tahun atau telah perna kawin.
3. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Nyata-nyata sedang tidak gangguan jiwa/ingatannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif, yaitu menggambarkan pengaruh politik uang terhadap kebijakan kepala desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik atau factor-faktor tertentu.¹⁶

¹⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012),
hm 35

Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan dan menganalisis yaitu mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat atau didengar tentang pengaruh preferensi masyarakat dalam memilih kepala desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan via wawancara, observasi dan juga dokumen terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi tersebut peneliti pilih karena pengamatan peneliti secara langsung tentang pemilihan kepala desa karena Desa Huta Baru berdekatan langsung dengan Desa Peneliti.

Sementara waktu penelitian peneliti laksanakan mulai bulan Agustus sampai November 2020.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi peneliti. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek peneliti.

Dengan demikian penelitian menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat-syarat di atas.

1. Kepala Desa Huta Baru
2. BPD Desa Huta Baru
3. Masyarakat Huta Baru
4. Tokoh agama
5. Tokoh Adat / Hatobangon

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologi adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁷ Pendekatan yudiris sosiologis adalah menekankan peneliti yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu bagaimana kebijakan kepala desa Huta Baru atas kemenangan dari politik uang.

E. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁷Seorjano Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1986), hlm. 51.

1. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber- sumber yang asli yang keterangannya berkaitan dengan Preferensi dan kebijakan kepala desa Huta Baru, dengan data-data yang diambil dari hasil wawancara. Dan wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, dimana wawancara yang peneliti siapkan terlebih dahulu daftar-daftar wawancara tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Huta Baru dan Masyarakat Desa Huta Baru.

Data utama yang berhubungan dengan objek yang dikaji yakni informasi Politik Uang yang terjadi pada Pilkades Huta Baru dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan setelah kemenangan atas politik uang tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka atas pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan yang memberikan penjelasan tentang bahan data primer. Data ini bersifat pelengkap yang diperoleh dari tulisan-tulisan dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian ini seperti Fiqh Siyasah, Hukum Adat dan Hukum

Islam, serta dokumen-dokumen resmi terkait yang menjelaskan data primer.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrument pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu langsung dengan Kepala Desa Huta Baru dan Masyarakat Desa Huta Baru untuk memperoleh informasi terhadap persoalan dan Preferensi Politik di Desa Huta Baru dengan terlebih dahulu peneliti menyiapkan draft pertanyaan yang akan diajukan.

2. Observasi

Metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta yang diselidiki. Dan penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan langsung kebijakan Kepala Desa mengenai Infrastruktur, bantuan sosial dan Legitimasi Kepala Desa Huta Baru.

3. Dokumen

Dokumen digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yaitu dari Kantor Kepala Desa Huta Baru ataupun instansi terkait. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya sejarah Desa Huta Baru Data Musrenbang(Musyawarah Rencana Bangunan) sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dan peta Desa Huta Baru.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan literatur-literatur yang ada. Setelah di telaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul data selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis tersebut dapat memberi arti dan makna yang

berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana Preferensi Politik pada pemilihan Kepala Desa Huta Baru.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul data selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana Preferensi Politik pada pemilihan Kepala Desa Huta Baru.

Adapun teknik analisis data secara kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis. Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu:

1. Data yang diperoleh dari Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru dari hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi, kemudian dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk di pahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang suatu ilmu.
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data Perivikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara strukural.

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian

tersebut, hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.¹⁸

H. Hipotesis

Bedasarkan latar belakang diatas permasalahan dihubungkan dengan teori- teori yang relevan maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

“Diduga Bahwa Yang Menjadi Preferensi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Adalah adalah Faktor Adanya Perangsang, Faktor Karakteristik Seseorang, Faktor Karakteristik Sosial dan Faktor Situasi dan Lingkungan Itu Sendiri”.

¹⁸*Ibid*, hlm. 33.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Demografi.

Desa Huta Baru terletak dalam wilayah Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Pasar

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sipenggeng

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Aek Parsariran

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sianggungan

Berikut luas wilayah Desa Huta Baru :

Tabel I
Luas Wilayah¹⁹

NO	TEMPAT	LUAS
1	Pemukiman	52,2 ha/ m2
2	Perkebunan	76,88 ha/ m2
3	Kubur	1 ha/ m2
4	Pekarangan	25,7 ha/ m2
5	Perkantoran	0,8 ha/ m2
6	Prasarana Umum	92 ha/ m2
7	Persawahan	86,35 ha/ m2
Total Luas		538,1 ha m2

Dari table I diatas kita mengetahui bahwa luas menurut penggunaan adalah 538,18 ha/ m2 dan terbagi dalam beberapa bagian penggunaan seperti persawahan yang menjadi wilayah penggunaan terluas di Desa Huta Baru seluas 86,35 ha/ m2 kemudian wilayah pemukiman seluas 52,5 ha/ m2 dan wilayah perkebunan seluas 76,88 ha/ m2, wilayah prasarana umum seluas 92 ha/ m2, pekarangan seluas 45, 7 ha/ m2, kantor seluas 0,8 ha/ m2 dan terahir luas wilayah perkuburan 1 ha/ m2.

Iklim Desa Aek Huta Baru sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan Pertanian yang ada di Desa Huta Baru.

¹⁹Data Statistik Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Tabel 2
Potensi S.D.M²⁰

NO	JUMLAH	TAHUN 2019
1	Jumlah Laki-Laki	346
2	Jumlah Perempuan	324
Jumlah Total		670

Table 2 menunjukkan jumlah penduduk Desa Huta Baru di tahun 2020 sebanyak 670 Jiwa dengan persentase Laki-Laki 346 Jiwa dan Perempuan 324 Jiwa.

3. Mata Pencaharian

Tabel 3
Mata Pencaharian²¹

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH/JIWA
1	Petani	467
2	PNS	15
3	Peternak	18
4	TNI	2
5	POLRI	2
Jumlah Total		486

Tabel 3 menunjukkan jenis mata pencaharia Desa Huta Baru mayoritas sebagai Petani, sector pertanian memang

²⁰Data Statistik Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016

²¹Data Statistik Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016

merupakan wilayah terluas di Desa Huta Baru seperti persawahan. Sedangkan pekerjaan sebagai peternak juga lumayan banyak digeluti masyarakat Desa Huta Baru yang berjumlah 18 jiwa, sedangkan sebagai PNS sebanyak 15 jiwa, TNI sebanyak 2 jiwa dan Polri sebanyak 2 jiwa.

4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Huta Baru secara kasat mata terlihat jelas mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani, hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani terutama petani salak dan karet, sehingga belum bisa mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat dan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya memilih menjadi petani.

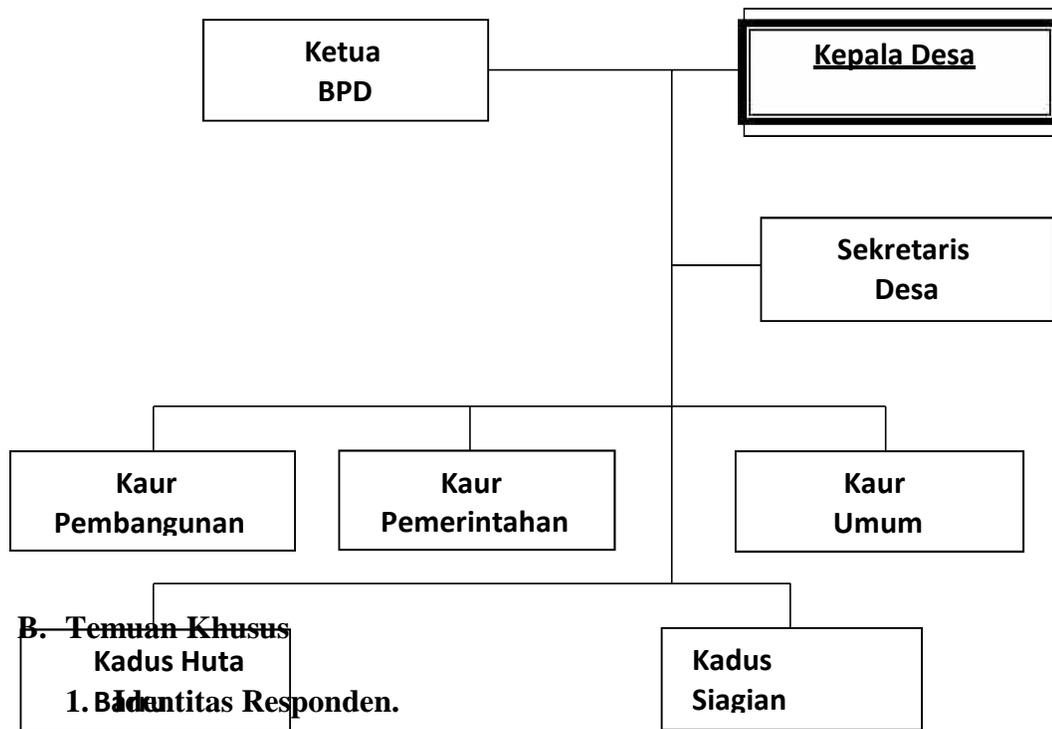
Dari hasil wawancara dengan informan Bapak Rustam Lubis sebagai seorang petani mengungkapkan dari bertani informan bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp. 75.000. /hari, bahkan jika hasil dari bertani karet tidak sesuai harapan bahkan bisa sama sekali tidak mendapat penghasilan karena tidak pernah naiknya harga karet, belum ditambah dengan harga bahan-bahan pokok yang melambung.²²

5. Kondisi Agama

²²Rustam Lubis, wawancara Pada Tanggal 24 Agustus 2020

Agama merupakan hal yang paing penting dan paling mendasar bagi setiap manusia untuk memberikan arah dan juga sebagai tuntunan dalam kehidupannya. Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan 100% beragama Islam.²³

6. Sturktur Kelembagaan Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.



Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 : Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

²³Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	65	65 %
2	Perempuan	35	35 %
Jumlah		100	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden laki-laki adalah responden yang terbanyak yaitu berjumlah 65 orang tau 65%, sedangkan responden perempuan hanya berjumlah 35 orang atau 35%.

Adapun untuk jumlah responden berdasarkan tingkat umur memiliki tingkat umur yang berbeda-beda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 : Responden Berdasarkan Tingkat Umur.

No	Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase
1	17 – 25	29	29 %
2	26 – 35	25	25 %
3	36 – 45	34	34 %
4	46 – 55	12	12 %
Jumlah		100	100%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari 100 responden maka yang paling dominan adalah yang berumur 36 - 45 tahun yaitu berjumlah 34 orang atau 34% kemudian disusul oleh 17 – 25 tahun sebanyak 29 orang atau 29%. Sedangkan yang paling sedikit adalah yang berumur 46 – 55 orang yaitu sebanyak 12 orang atau 12%..

Adapun jumlah responden yang terdapat pada tabel diatas mempunyai latar belakang pendidikan formal yang

berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 : Responden Berdsarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	18	18 %
2	SMP	23	23 %
3	SMA	55	55 %
4	Perguruan Tinggi	4	4 %
Jumlah		100	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak adalah berasal dari pendidikan SMA yang berjumlah 55 orang atau 55%. Kemudian disusul oleh SMP sebanyak 23 orang atau 23%. Sedangkan yang paling sedikit terdapat pada Perguruan Tinggi yakni hanya 4 orang atau 4%.

Pengaruh tingkat pendidikan yang ditempuh oleh responden tentunya berdampak pada pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 : Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Petani	47	47 %
2	Pedagang	26	26 %
3	Ibu Rumah Tangga	21	21 %
4	PNS	6	6 %
Jumlah		100	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa identitas responden berdasarkan jenis pekerjaan yang terbanyak adalah

cendrung sebagai petani yakni dengan jumlah 47 orang atau 47% kemudian disusul oleh pedagang sebanyak 26 orang atau 26% sedangkan yang paling sedikit berkerja sebagai PNS yakni hanya 6 orang atau 6%.

2. Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru

Penulis menjabarkan menjadi empat indicator yang menjadi preferensi masyarakat dalam memilih Kepala Desa yaitu, adanya perangsang, karakteristik seseorang, karakteristik sosial dan situasi dan lingkungan itu sendiri.

A. Adanya Perangsang

Perangsang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya dari pihak- pihak tertentu untuk menarik perhatian masyarakat untuk memilih calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa. Adanya Perangsang yaitu meliputi preferensi masyarakat dalam berpolitik dipengaruhi oleh bantuan-bantuan materi dari pihak-pihak tertentu, dengan *money politic*, dan dengan bentuk-bentuk pemberian lainnya.

Untuk mengetahui preferensi politik masyarakat desa Huta Baru dari indikator *Adanya Perangsang* dari pertanyaan yang peneliti berikan kepada masyarakat yaitu

Setujukah Anda bahwa preferensi masyarakat terhadap politik khususnya dalam pemilihan Kepala Desa, tergantung dari apa yang akan diberikan oleh calon Kepala Desa tersebut?

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pertanyaan di atas dapat kita lihat dari tabel berikut :

Table 5 : Tanggapan Responden Mengenai Preferensi Politik Masyarakat Tergantung Dari Apa Yang Diberikan.

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	56	56%
2	Kurang Setuju	39	39%
3	Tidak Setuju	5	5%
Jumlah		100	100%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 56 orang atau 56% responden. Sedangkan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 39 orang atau 39%, dan paling sedikit responden menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5 orang atau 5% dari pertanyaan yang peneliti ajukan, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya, masyarakat mengakui bahwa preferensi mereka terhadap politik harus ada *feedback* yang mereka dapatkan. Jadi masyarakat beranggapan preferensi politik mereka harus dapat memberikan efek positif baik berupa imbalan materi dan lain- lain.

Hal ini di sebabkan karena pada kenyataanya sering kali terjadi di masyarakat para calon Kepala Desa tidak jarang menggunakan politik uang (*Money Politic*) agar mereka dapat memenangkan pemilihan Kepala Desa yang akan di laksanakan. Kasus seperti ini juga dikarenakan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat yang di janjikan olah calon Kepala Desa dalam melaksanakan kampanye yang secara psikologis dapat menjadi preferensi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa.

Tentunya hal ini di sebabkan karena memang perlu adanya perangsang sebagai preferensi politik masyarakat, perangsang tersebut dapat berupa pemberian bantuan kepada masyarakat berupa “Uang” yang diantarkan langsung kerumah-rumah masyarakat oleh calon kepala desa tersebut.

Hasil penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan dari pertanyaan yang diajukan peneliti kepada masyarakat dengan indikator *Adanya Perangsang (monay politic)*, masyarakat menyatakan setuju dengan adanya politik uang (*monay politik*), pemberian hadiah dan pemberian bantuan sebagai preferensi dalam pemilihan Kepala Desa Huta Baru. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara penulis dengan responden Muhammad Abduh salah seorang masyarakat

desa Huta Baru mengatakan terus terang mengapa memilih salah satu calon kepala desa karena memang ada pemberian berupa uang dan bantuan pangan kepada keluarganya sehingga ada timbal balik yang positif dalam memilih salah satu calon Kepala Desa.²⁴

B. Karakteristik Seseorang

Karakteristik seseorang meliputi sikap atau kepribadian seseorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi serta memiliki kepedulian terhadap kepentingan masyarakat banyak. Untuk mengetahui preferensi politik masyarakat desa Huta Baru dari indikator *karakteristik seseorang* dari pertanyaan yang peneliti berikan kepada masyarakat. Dapat kita lihat dari tabel berikut :

Table 6 : Tanggapan Responden Terhadap Preferensi Politik Masyarakat Dari Karakteristik Seseorang

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	52	48%
2	Kurang Setuju	33	35%
3	Tidak Setuju	15	17%
Jumlah		100	100 %

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 52 orang atau 52% responden. Sedangkan yang menyatakan kurang setuju

²⁴ Muhammad Abduh, Wawancara Pada Tanggal 20 November 2020

sebanyak 33 orang atau 33%, dan paling sedikit responden menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 15 orang atau 15% dari pertanyaan yang peneliti ajukan. Hal ini disebabkan karena watak atau keperibadian calon Kepala Desa menjadi hal yang paling penting untuk menarik simpati dan empati masyarakat untuk memilih calon Kepala Desa tersebut.

Kepedulian calon Kepala Desa terhadap masalah sosial juga mencerminkan kepribadian calon Kepala Desa tersebut, sehingga dapat menarik simpati masyarakat untuk memilih calon Kepala Desa tersebut.

Peneliti menyimpulkan dari pertanyaan yang diajukan peneliti kepada masyarakat dengan indikator *Karakteristik Seseorang*, bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Huta Baru yang sangat menentukan adalah karakter seseorang calon Kepala Desa. Hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan Sarilen Siregar salah seorang masyarakat desa Huta Baru mengatakan bahwa untuk menjadi pemimpin harusnya bisa dijadikan sebagai contoh dan panutan. Seseorang yang memiliki karakter, watak dan perilaku yang baik bisa dijadikan sebagai pemimpin di Desa Huta Baru, dan itulah sebabnya responden menjadikan karakteristik sebagai preferensi dalam pemilihan Kepala

Desa Huta Baru.²⁵

C. Kepedulian Sosial

Kepedulian sosial meliputi bagaimana jiwa sosial kemasyarakatan calon Kepala Desa. Untuk mengetahui preferensi politik masyarakat desa Huta Baru dari indikator *kepedulian sosial* dari pertanyaan yang peneliti berikan kepada masyarakat. Dapat kita lihat dari tabel berikut :

Table 6 : Tanggapan Responden Terhadap Preferensi politik Masyarakat Dari Kepedulian Sosial.

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	42	42%
2	Kurang Setuju	32	32%
3	Tidak Setuju	26	26%
Jumlah		100	100 %

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 42 orang atau 42% responden. Sedangkan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 32 orang atau 32%, dan paling sedikit responden menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 26 orang atau 26% dari pertanyaan yang peneliti ajukan. Hal ini disebabkan karena kepedulian calon Kepala Desa terhadap masalah sosial mencerminkan kepribadian calon Kepala Desa tersebut, sehingga dapat menarik simpati masyarakat untuk memilih calon Kepala Desa tersebut.

²⁵ Sarilen Siregar, Wawancara Pada Tanggal 20 November 2020

D. Status Sosial Yang Tinggi

Status sosial merupakan salah satu indikator dalam menentukan preferensi politik dalam Pemilihan Kepala Desa Huta Baru. Untuk mengetahui preferensi politik masyarakat desa Huta Baru dari indikator *Status Sosial Yang Tinggi* dari pertanyaan yang peneliti berikan kepada masyarakat. Dapat kita lihat dari tabel berikut :

Table 7 : Tanggapan Responden Terhadap Preferensi Politik Masyarakat Dari Status Sosial Yang Tinggi.

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	18	18%
2	Kurang Setuju	39	39%
3	Tidak Setuju	43	43%
Jumlah		100	100 %

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 43 orang atau 43% responden. Sedangkan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 39 orang atau 39%, dan paling sedikit responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 18 orang atau 18% dari pertanyaan yang peneliti ajukan. Status sosial merupakan salah satu indikator dalam menentukan preferensi politik dalam Pemilihan Kepala Desa Huta Baru. Untuk mengetahui preferensi politik masyarakat desa Huta Baru dari indikator *Status Sosial Yang Tinggi* dari pertanyaan yang peneliti berikan kepada masyarakat Hasil penelitian di

lapangan, peneliti menemukan bahwa banyak atau sedikitnya preferensi politik masyarakat tidak tergantung kepada orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, hal ini terbukti dari hasil wawancara peneliti dengan Mara Sutan Harahap salah satu masyarakat Desa Huta Baru mengatakan dalam memilih Kepala Desa responden tidak melihat dari status sosialnya, siapapun dia ketika memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka ia boleh saja menjadi Kepala Desa.²⁶

Table 7 : Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Keempat Indikator Adanya Perangsang, Karakteristik Seseorang, Kepedulian Sosial dan Status Sosial Yang Tinggi.

No	Pernyataan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	
1	Adanyan Perangsang	56	39	5	100
2	Karakteristik Seseorang	52	33	15	100
3	Kepedulian Sosial	42	32	26	100
4	Status Sosial Yang Tinggi	18	39	43	100
Jumlah		168	143	89	400
Rata-rata		42	36	22	100
Persentase (%)		42%	36%	22%	100%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa mayoritas

²⁶ Mara Sutan Harahap, Wawancara Pada Tanggal 21 November 2020

responden menyatakan Setuju yaitu sebanyak 42 orang atau 42% dari keseluruhan responden, dengan demikian dapat dikatakan bahwa keempat faktor yaitu *Adanyan Perangsang*, *Karakteristik Seseorang*, *Kepedulian Sosial*, dan *status sosisal yang tinggi* menjadi preferensi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena dari masing- masing indikator tersebut sudah dimiliki oleh para calon Kepala Desa di Desa Huta Baru, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Huta Baru dapat terlaksana dengan baik dan partisipasi masyarakat desa munsalo sudah tinggi.

Indikator tertinggi yang menjadi preferensi politik yang paling banyak dipakai oleh masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Huta Baru yaitu *Adanya Perangsang* sebanyak 56 orang atau 56% dari keseluruhan responden, dengan demikian dapat dikatakan bahwa keempat indikator diatas, indikator *Adanya Perangsang* menjadi preferensi politik masyarakat terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanulli Selatan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa preferensi politik adalah alasan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Preferensi politik masyarakat di Desa Huta Baru dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Adanya Perangsang

Berdasarkan tabel 5, masyarakat setuju dengan adanya perangsang yang berupa uang dan lain sebagainya yang diberikan oleh calon kepala desa sebagai preferensi politik yaitu 56% masyarakat menyatakan setuju.

2. Karakteristik Seseorang

Berdasarkan tabel 6, masyarakat setuju dengan adanya karakteristik seseorang karena karakter seorang pemimpin yang baik akan menciptakan suatu kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat serta mementingkan kepentingan masyarakat dan masyarakat setuju sebagai preferensi politik yaitu 52% yang menyatakan setuju.

3. Kepedulian Sosial

Berdasarkan tabel 7, masyarakat setuju dengan adanya kepedulian sosial sebagai preferensi politik masyarakat karena kepedulian sosial pemimpin yang baik akan menciptakan suatu kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat serta mementingkan kepentingan masyarakat dan masyarakat setuju sebagai preferensi politik yaitu 42% yang menyatakan setuju.

4. Status Sosial Yang Tinggi

Berdasarkan tabel 8, mayoritas masyarakat menyatakan tidak setuju dengan faktor ini karena bagaimanapun status sosial calon akan tetap dipilih ketika karakternya baik, jadi indikator ini kurang menjadi preferensi masyarakat yaitu 43% masyarakat yang menyatakan tidak setuju.

Empat indikator diatas menjadi preferensi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan tabel 9. Karena dari masing- masing indikator tersebut sudah dimiliki oleh para calon Kepala Desa di Desa Huta Baru, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan tingkat partisipasi dari masyarakat sudah tinggi.

Dari ke empat indikator diatas, yang paling dominan menjadi preferensi masyarakat adalah Adanya perangsang yaitu 56% dari 100 responden. Masyarakat desa Huta Baru lebih

dominan pada adanya perangsang berupa pemberian sesuatu diikuti dengan karakter seseorang atau melihat dari watak seseorang yang akan memimpin desa Huta Baru nantinya.

B. Saran

Disarankan bagi masyarakat Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan agar sudi dan dapat meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kepala desa, dan menghilangkan anggapan mereka yang salah, yang beranggapan tidak ada untung ruginya berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, karena dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa masyarakat dapat memilah-milah dan memilih calon kepala desa yang pantas dan dianggap mampu dan layak untuk menjadi seorang kepala desa.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan suatu hal yang sangat penting guna memilih kepala desa yang benar-benar memiliki kemampuan dan bisa menjadi sosok seorang pemimpin yang benar-benar diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu kepada aparatur kantor desa diharapkan :bisa memberikan informasi, bimbingan dan dapat bersosialisasi dengan

masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Semakin mengintensifkan program-program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai hal, yang berguna untuk merangsang minat masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif demi kemajuan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1996.
- Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Bandung, PT Mizan Publika.
- Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi kedua, 1994.
- Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta, Media Presindo, 1999.
- Abdullah Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- M. Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya, Pustaka Utama. 2004.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.

Umar Solehuddin , *Keadilan Demokrasi dan Korupsi*, Jakarta Rajawali
Pers, 2011.

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke
Postmodernisme)*, Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
2015.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers,
2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli
Selatan

Data Statistik Desa Aek Nabara Kecamatan Angkola Barat Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2016

Mohammad Amanu, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa(Studi
Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri*”,
skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Andi Akbar “*Pengaruh Pollitik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat
Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa
Barugae Kecamatan Bulukumba)*”, skripsi UIN Alauddin Makassar ,
2016.

Syamsul Hadi, *Kriteria Money Politik Dalam Pemilu Perspektif
HukumIslam*, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan
Hukum,2012)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik Pasal 73 ayat

4

Ikhsan Ahmad, *Pilar Demokrasi Kelima*, Bandung, Prenadamedia, 2018

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Sukidin, Dkk, *Sosiologi Politik*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2008.

Seorjano Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2014

Portal Pemda LPSE Kabupaten Tapanuli Selatan

Ikhsan Ahmad, *Pilar Demokrasi Kelima*, Bandung, Prenadamedia, 2018.

Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Baqarah Ayat 188

(HR. Imam Ahmad Nomor 2212)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Ihwan Sormin
2. Nim : 1610300026
3. Tempat/Tanggal Lahir : Sisoma, 25 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Alamat : Simatorkis Sisoma, Kec. Angkola Barat

B. BIODATA ORANGTUA

1. Ayah

- Nama : Hibban Sormin
- Pekerjaan : Tani
- Alamat : Simatorkis Sisoma, Kec. Angkola Barat

2. Ibu

- Nama : Tiaya Pane
- Pekerjaan : Tani
- Alamat : Simatorkis Sisoma, Kec. Angkola Barat

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1. SD Negeri 100010 Simatorkis Sisoma**
- 2. SMP Negeri 1 Angkola Barat**
- 3. SMK Negeri 2 Batangtoru**
- 4. IAIN Padangsidimpuan**

D. PENGALAMAN ORGANISASI INTRA KAMPUS

- 1. Menteri Hukum dan Keamanan Kmpus DEMA IAIN
Padangsidimpuan 2017-218**
- 2. Pengurus Qiyamul Lughah Fasih 2017-2018**
- 3. Ketua KPPR 2018-2019**

E. PENGALAMAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS

- 1. Wasekum PA Komisariat Lafran Pane HMI Cabang
Padangsidimpuan.**
- 2. Ketua IMA BARAT (Ikatan Mahasiswa Angkola Barat) 2017-
2018.**
- 3. Ketua Naposo Nauli Bulung Kecamatan Angkola Barat.**

Penulis, Januari 2021

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa alasan masyarakat sehingga ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa ?
2. Bagaimana Pendekatan calon kepala desa dalam mengambil hati masyarakat?
3. Apa faktor yang mempengaruhi masyarakat desa huta baru menerima berupa hadiah dari kandidat?
4. Bagaimana pengaruh dari karakteristik calon kepala desa?
5. Apa saja indicator sehingga masyarakat memilih kepala desa?
6. Apa yang menyebabkan masyarakat memilih calon kepala desa?
7. Bagaimana preferensi masyarakat dalam pemilihan kepala desa?

DOKUMENTASI









PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANGTORU
DESA HUTABARU

Desa Huta Baru, November 2020

Nomor : 141 / 2020 / XI / 2020
Sifat :-
Hal : Balasan Permohonan Izin Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Menindak lanjuti surat dari Institute Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor: B-557/ In. 14/D.1/TL.00/11/2020 tanggal 6 Agustus 2020, tentang Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan judul " Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan" .

Pada prinsipnya kami telah menyetujui kegiatan penelitian yang dimaksud untuk memperlancar skripsi atas nama:

Nama : Ihwan Sormin
Nim : 1610300026
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Lk. VII, Kel. Simatorkis Sisoma

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Desa Huta Baru, November 2020



MUHLIS POHAN
Kepala Desa Huta Baru